

TUJUH TAHUN OMBUDSMAN RI, MENGGENGAM KOMITMEN PERBAIKAN DI SULAWESI BARAT

Rabu, 21 Oktober 2020 - I Komang Bagus

Mamuju - Negara mengamanatkan Ombudsman RI untuk melakukan pengawasan atas segala bentuk pelayanan publik untuk menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ombudsman sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU/37 Tahun 2008.

"Tugas dan wewenang Ombudsman juga diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tutur Lukman Umar Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar pada Rabu (21/10/20).

Luasnya ruang lingkup pengawasan Ombudsman, seakan lembaga ini menjadi salah satu lembaga *super body*.

"Jadi Ombudsman itu mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah," ungkapnya lebih lanjut.

Termasuk juga pelayanan yang diselenggarakan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang memnggunakan anggaran bersumber dari APBN dan atau APBD.

Sebagai perpanjangan tangan Negara Ombudsman membentuk kantor perwakilan di sejumlah wilayah termasuk di Sulawesi Barat, di Sulawesi Barat sendiri Ombudsman terbentuk sejak tahun 2013.

Salah satu tujuan kehadiran lembaga ini tidak lain untuk menjamin kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan juga membuka ruang kepada masyarakat yang ingin mengadukan tindakan maladministrasi dan pelayanan publik.

"Hari ini, Ombudsman genap berusia 7 tahun berdiri di Sulawesi Barat. Keberadaan lembaga ini diharapkan tetap komitmen sebagai wadah bagi publik, penyambung aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas," harap Lukman.

Dalam kurun waktu 7 tahun, lembaga ini telah menerima dan menindaklanjuti sekitar 2.000 pengaduan masyarakat dan sebagian besar telah diselesaikan.

Dengan jumlah personil 10 orang asisten yang dikomando satu orang kepala perwakilan dengan wilayah kerja 6 kabupaten, tentu masih banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan semua mitra kerja.

Namun demikian dari berbagai kekurangan yang ada semoga Ombudsman Perwakilan Sulbar selalu mewakili aspirasi rakyat dan komitmen mewujudkan perbaikan pelayanan publik menuju tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel.

